

BAB II TINJAUAN TEORITIK

Pada kajian berbasis praktikum yang peneliti lakukan dalam mengembangkan desain awal *Tool Kit* PK3C didasarkan pada tinjauan teoritik tentang dimensi kemiskinan dan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, ilmu kesejahteraan keluarga, *community change* dan *community capacity building*, *human capability* dan *human capital*, serta literasi keuangan dan edukasi keuangan (Syahroeddin, 2022). Kemudian secara komprehensif pada pengembangan *Tool Kit* PK3C kajian ini diperoleh tinjauan teoritik berikut :

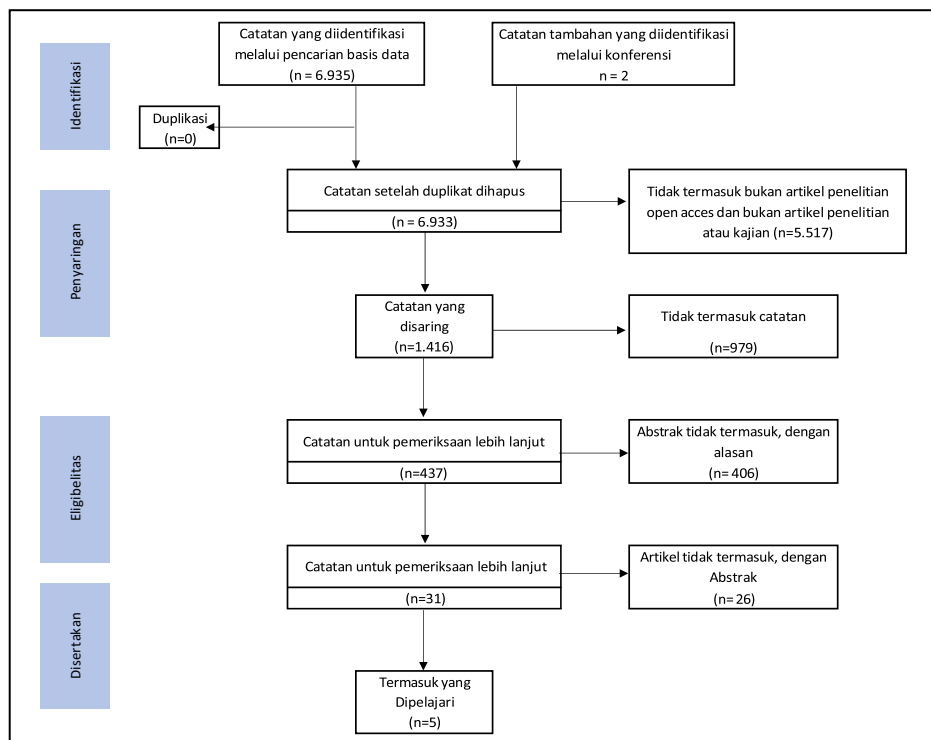
2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu. Metode tinjauan literatur yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis yang merujuk pada panduan tinjauan sistematis yang dikembangkan oleh Khan (Huttar & BrintzenhofeSzoc, 2020) dan PRISMA *Flowchart* dari tinjauan sistematis (Moher dkk., 2009). Kajian terhadap penelitian terdahulu mengacu pada daftar karakteristik inklusi untuk tinjauan abstrak dan tinjauan teks lengkap. Berikut kriteria inklusi yang menjadi dasar dari pencarian kajian yang relevan :

1. Basis data yang digunakan pada penelitian ini melalui pencarian artikel yang diterbitkan 10 tahun terakhir (tahun 2013 – 2023).
2. Pencarian menggunakan kombinasi istilah *financial literacy* dan *poor women*.
3. Jenis dokumen jurnal penelitian *open accesed* dan berbahasa Inggris.
4. Area bidang dokumen penelitian ilmu sosial, ekonomi dan keuangan.

5. Populasi kajian yakni komunitas masyarakat miskin atau kelompok rentan yang menyertakan perempuan.
6. Cek kesesuaian pembahasan dengan literasi keuangan perempuan atau keluarga miskin pada judul dan abstrak.

Sistem basis data pada tinjauan literatur sistematis ini menggunakan *Sistem Database Science Dirrect* Setelah proses pencarian kajian dilakukan ulasan terhadap artikel lengkap dari kajian yang memenuhi kriteria. Gambaran proses tinjauan sistematis sebagai berikut :



Gambar 1. Flowchart PRISMA dari Tinjauan Sistematis Penelitian Terdahulu

Sumber : Hasil olah data peneliti 2023

Pada gambar 1 hasil pencarian awal menghasilkan 6.395 artikel dipersempit kriteria inklusi menjadi 31 artikel. Kemudian dilanjutkan peninjauan dari abstrak sehingga diperoleh 5 kajian yang ditinjau teks lengkapnya. Hasil temuan pada 5 artikel jurnal tersebut dirangkum dalam tabel matriks analisis berikut :

Tabel 1. Matriks Analisis Penelitian Terdahulu

Sitasi	Tujuan	Populasi	Metode	Temuan Penelitian
(Ghosh, 2022)	Menyelidiki dampak pemberdayaan politik perempuan di India terhadap inklusi keuangan mereka	Populasi perempuan india terdiri dari 131,547 responden	Kuantitatif, Survei	Temuan ini juga mengindikasikan bahwa pemberdayaan politik perempuan dapat memengaruhi infrastruktur fisik dan literasi, sehingga meningkatkan aktivitas rekening.
(Goyal & Kumar, 2021)	Menyajikan rangkuman komprehensif mengenai pengetahuan kuantitatif dan kualitatif tentang subjek literasi keuangan yang terus berkembang	Tinjauan terhadap 502 artikel yang diterbitkan dalam jurnal yang diulas oleh rekan sejawat dari tahun 2000 hingga 2019	Tinjauan sistematis dan analisis bibliometrik	Tema-tema yang muncul yang diidentifikasi antara lain kemampuan keuangan, inklusi keuangan, kesenjangan gender, literasi pajak dan asuransi, serta edukasi keuangan digital.
(Kara dkk., 2021)	Meninjau bukti empiris yang berkembang mengenai apakah karakteristik demografis individu (seperti jenis kelamin dan ras) dan fitur-fitur sosio-ekonomi (seperti pendapatan dan pendidikan) mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses kredit.	Tinjauan terhadap 1.146 artikel yang diterbitkan dalam jurnal dari tahun 2000 hingga 2020	Tinjauan sistematis literatur	Memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan/atau lebih melek finansial akan meningkatkan akses rumah tangga dan pengusaha terhadap kredit sehingga berpeluang meningkatkan inklusi keuangan.
(Lee & Huruta, 2022)	Menyelidiki peran literasi keuangan dalam hubungan antara pemberdayaan perempuan dan <i>green microfinance</i>	Kelompok petani perempuan di NTT. Total responden 80 orang untuk fase 1. Total informan 7 orang untuk FGD.	Mix Method, penentuan data dengan <i>purposive sampling</i> , pengumpulan data survei dan FGD	Literasi keuangan berbasis kearifan lokal terbukti menjadi alternatif untuk mengarusutamakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah
(Sharma & Johri, 2014)	Menyajikan sebuah penelitian berbasis desain dan kasus implementasi alat literasi keuangan yang dibuat untuk membantu peserta didik dalam memahami keuntungan investasi jangka panjang	Informan adalah orang yang bekerja di LSM dan bertanggung jawab mengawasi berbagai <i>Self Help Group</i> di wilayah tertentu dan kelompok perempuan di pedesaan India	Studi Kasus Eksploratif	Keuntungan dari memanfaatkan konteks lokal untuk membangun alat bantu pengajaran dan mendukung pandangan bahwa pembelajaran adalah penciptaan dan penerapan praktik-praktik yang sesuai dengan konteks (inklusi keuangan dengan perencanaan investasi)

Sumber : Hasil olah data penelitian 2023

Sebagaimana pada Tabel 1, terdapat masing-masing 2 artikel yang terbit pada tahun 2022 dan 2021 serta 1 artikel terbit pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kelima penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan pada kelima artikel yakni menggiring pemahaman terkait literasi keuangan menciptakan peluang tercapainya inklusi keuangan yang berpotensi meningkatkan taraf hidup seseorang.

Pada pembahasan dari kelima artikel menguatkan pemahaman inklusi keuangan dapat berjalan dengan menguatkan peran perempuan tidak hanya dalam keluarga tetapi juga masyarakat. Subjek penelitian pun memiliki kesamaan yakni menyertakan perempuan dari kelompok rentan dan atau keluarga miskin. Pada artikel karya Sharma dan Johri (2014) memiliki kesamaan secara khusus terkait dengan meningkatkan kesadaran literasi keuangan perempuan dari keluarga miskin tidak terlepas dari kebutuhan alat bantu pembelajaran dan partisipasi langsung dari peserta.

Perbedaan dari kelima penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada metode penelitian, *output* akhir dari penelitian dan sudut pandang penelitian. Pada kelima penelitian terdahulu tidak memiliki jenis metode penelitian yang sama. peneliti menggunakan metode *Participation Action Research* (PAR) yang menghasilkan sebuah prototipe alat bantu literasi keuangan yang mencakup beberapa kompetensi dalam literasi keuangan. Kemudian *output* dari 4 penelitian terdahulu lebih berfokus menghasilkan gambaran situasi terkait literasi keuangan sementara pada penelitian Sharma dan Johri (2014) berfokus pada kajian eksploratif terkait alat bantu literasi keuangan dalam sebuah kompetensi

keuangan yakni investasi. Alat bantu yang dimaksud dalam penelitian Sharma dan Johri (2014) juga tidak memposisikan perempuan dari keluarga miskin sebagai pengguna alat bantu melainkan sebagai sasaran perubahan. Sudut pandang yang digunakan peneliti pada penelitian ini mengutamakan pendekatan pekerjaan sosial, sementara dari kelima penelitian terdahulu tidak ada satu pun yang menggunakan pendekatan pekerjaan sosial.

2.2 Kepustakaan yang Relevan

Memperkaya khasanah pengetahuan dalam mengembangkan *Tool Kit* PK3C dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian lanjutan terhadap beberapa teori sebagai berikut :

2.2.1 Kajian tentang Kemiskinan Perempuan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional. Merujuk pada World Bank (2000) menyebutkan kemiskinan adalah situasi kekurangan dalam kesejahteraan (Haughton & Khandker, 2009). Kesejahteraan sendiri sering diasosiasikan dengan penguasaan atas komoditas dan jenis konsumsi tertentu. Hal ini menyebabkan kemiskinan sering dipandang sebagian besar dalam bentuk uang yang kemudian diukur lebih lanjut dengan dimensi tertentu. Lebih lanjut kesejahteraan dilihat dari sudut pandang yang lebih luas sebagai kemampuan individu untuk berfungsi di dalam masyarakat (Dowling, 2020).

Orang miskin sering kali tidak memiliki kemampuan utama agar berfungsi di masyarakat. Umumnya orang miskin akan kekurangan dari sisi pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan politik sehingga mereka cenderung merasa tidak berdaya. Mengukur kemiskinan menjadi penting sebagai bahan menentukan strategi dalam mengurangi kemiskinan (Dowling, 2020; Haughton & Khandker,

2009). Pada waktu tertentu dalam masyarakat apapun, kemiskinan yang multidimensional menyebabkan adanya variasi dalam mengukur kemiskinan itu sendiri.

Mengukur kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2023). Masyarakat dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Terlepas dari upaya mengukur kemiskinan dan mendeskripsikan kemiskinan, kemiskinan sendiri termasuk dalam ranah stigma. Stigma yang dimaksud bukanlah menjadi miskin, melainkan persepsi sosial tentang atribut yang menganggapnya sebagai stigma (Dowling, 2020).

Orang yang tidak miskin membentuk sebuah opini terkait orang miskin memiliki cacat karakter sehingga mereka. Cacat karakter ini jika dikaitkan dengan jenis stigma dilihat dari kelainan bentuk fisik; kesukuan ras, bangsa dan agama; dan karakter individu. Perspektif orang tidak miskin terhadap karakter cacat tersebut akhirnya membentuk istilah budaya kemiskinan. Perspektif ini menentukan bagaimana orang bersikap dan berperilaku. Kebanyakan orang memiliki prasangka dan respon emosional atas stigma yang melekat pada orang miskin. Hal ini menunjukkan sifat subyektif dari kemiskinan dan hubungannya dengan stigma menunjukkan bahwa ukuran obyektif hanya dapat mengukur sebagian dari kemiskinan (Dowling, 2020).

Interaksi yang terjadi antara orang tidak miskin dan orang miskin yang akhirnya membangun atribut sosial dan stigma pada orang miskin membuktikan

bahwa kemiskinan bukan lagi fenomena alamiah, tetapi dipertajam lagi pada pendekatan yang berlawanan. Pendekatan berlawanan yang dimaksud yaitu pemahaman bahwa kemiskinan merupakan produk dari disfungsi, penyimpangan, atau jalinan patologi yang melanggengkan diri sendiri (Pierson, 2016). Konsep *social exclusion* atau pengucilan sosial dipergunakan untuk menjembatani kesenjangan antara pendekatan yang saling berlawanan. *Social exclusion* menjelaskan penyebab struktural dari kemiskinan (contoh : upah rendah dan disorganisasi ekonomi) dan sumber budaya moral dan perilakunya.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh karakteristik tingkat wilayah, tingkat komunitas dan tingkat rumah tangga atau individu (Dowling, 2020). Penyebab pertama pada tingkat wilayah meliputi kerentanan yang terjadi karena bencana alam, keterpencilan, kualitas tata kelola serta hak properti dan penegakannya. Penyebab kedua pada tingkat komunitas meliputi ketersediaan infrastruktur, layanan publik (pendidikan dan kesehatan) kedekatan dengan pasar dan hubungan sosial. Terakhir pada karakteristik rumah tangga atau individu meliputi demografis (seperti ukuran rumah tangga, usia, rasio ketergantungan, dan jenis kelamin kepala keluarga), ekonomi (seperti status pekerjaan, jam kerja, dan kepemilikan harta benda), dan sosial (seperti kesehatan dan gizi, pendidikan dan tempat tinggal).

Mengambil sudut pandang kemiskinan berdasarkan kategori wilayah yang dibagi antara perkotaan dan pedesaan, orang miskin perkotaan saat ini menderita tingkat kekurangan yang sering kali yang lebih parah daripada yang dialami oleh orang miskin di pedesaan (Beck & Purcell, 2020). Pengalaman mengalami

kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki perbedaan yang berpengaruh pada upaya mengurangi kemiskinan dan cara menyikapi kemiskinan.

Masyarakat pedesaan cenderung memiliki koalisi sosial yang lebih baik dari pada masyarakat perkotaan. Daerah pedesaan memiliki model masyarakat yang baik, kerja sama, ikatan kekeluargaan dan integrasi masyarakat (Harr & Yancey, 2014; Pierson, 2016; Walters dkk., 2020), tetapi kemiskinan yang terjadi di pedesaan terus berkembang. Tidak lagi hanya berputar pada masalah terbatasnya lapangan pekerjaan terutama dengan upah yang cukup (Hill dkk., 2020), dan tidak tersedianya layanan kesehatan, sosial dan pendidikan (World Bank, 2020). Perkembangan saat ini mengarah pada kurangnya sumber daya umum dan lembaga-lembaga masyarakat yang tidak memadai dan tidak dapat diakses masyarakat pedesaan (Scales dkk., 2014). Normalisasi pendapatan rendah yang ada di pedesaan secara umum membuat kemiskinan di pedesaan tidak terlalu terlihat.

Berbeda dengan area pedesaan, kemiskinan perkotaan diuraikan pada pengakuan bahwa kehidupan daerah perkotaan dimediasi oleh uang (Lemanski & Marx, 2015). Area kota menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan politik serta secara bersamaan mengalami timpang tindih institusi. Kompleksnya situasi perkotaan menyebabkan kemiskinan perkotaan dilihat dari 3 isu yang saling berkaitan. Isu pertama yakni kemiskinan perkotaan tidak cukup dijelaskan hanya berdasarkan pendapatan melainkan harus mencakup karakteristik lainnya. Hal ini terjadi karena dinamika dan padatnya aspek kehidupan perkotaan menyebabkan proses kemiskinan bekerja secara kumulatif (Lemanski & Marx, 2015). Isu kedua

keragaman kehidupan yang ada di perkotaan menyebabkan kemiskinan di perkotaan harus diselesaikan secara simultan di berbagai bidang. Terlepas membandingkan kemiskinan dari segi geografi perkotaan dan pedesaan, upaya mengurangi kemiskinan harus terus dilakukan. Joseph Wresinski berargumentasi efektivitas dalam menghadapi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menuntut 3 jenis kombinasi pengetahuan (V. Beck dkk., 2020). Ketiga kombinasi pengetahuan yang dimaksud yakni yang diperoleh dari :

1. Pengetahuan dari pengalaman orang yang mengalami kemiskinan dan orang yang paling mampu menentukan perubahan atas apa yang perlu dilakukan.
2. Pengetahuan dari para profesional yang melayani orang yang paling kekurangan.
3. Pengetahuan akademis yang sangat diperlukan namun tetap bersifat parsial, tidak langsung dan murni informatif.

Kemiskinan erat hubungannya dengan ketidaksetaraan dan kerentanan. Ketidaksetaraan dan kerentanan menyebabkan situasi tidak berdaya dan penindasan. Norma budaya yang ada dimasyarakat menentukan peran dari laki-laki dan perempuan. Norma tersebut adalah norma gender yang dikonstruksikan secara sosial dimana ketika terjadi pelanggaran norma tersebut dapat mengakibatkan marginalisasi, diskriminasi dan kekerasan (Marsiglia dkk., 2021). Struktur sosial dimasyarakat yang terbentuk dari norma budaya menempatkan perempuan berada dalam posisi tidak menguntungkan.

Gender adalah peran dan tanggung jawab yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan dimana gender ditetapkan oleh masyarakat dan budaya

(Dalimoenthe, 2020). Gender erat kaitannya dengan suatu proses keyakinan mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan diharapkan untuk dapat bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya mereka masing-masing. Gender dapat dipahami sebagai pemahaman mengenai posisi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, peran, dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan, tanggung jawab dan hak (Dalimoenthe, 2020). Pemahaman akan gender kemudian menimbulkan kesadaran akan peran gender.

Peran gender merupakan hasil interpretasi suatu budaya terhadap perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki (Dalimoenthe, 2020). Seiring berjalannya waktu terjadi transformasi peran gender. Terdapat empat jenis peran dalam gender di antaranya peran produktif, peran reproduktif dan peran sosial (Dalimoenthe, 2020). Peran produktif kegiatan menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan seperti proses pencarian nafkah. Peran reproduktif terkait dengan semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup. Terakhir peran sosial merujuk pada semua aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan dan mengorganisasi kehidupan masyarakat seperti kegiatan sosial budaya maupun pelayanan yang ada di masyarakat.

Peran gender berdampak pada relasi sosial yang hierarkis dan cenderung dominatif antara perempuan dan laki-laki. Perempuan menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan laki-laki karena norma dan nilai budaya, pembagian aset berdasarkan gender, dan dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Atozou dkk., 2017). Hal ini memposisikan perempuan pada masalah

finansial yang menyebabkan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Konsumsi rumah tangga sampai saat ini dinilai sebagai skema saling berbagi. Faktanya ditemukan ketidaksetaraan yang signifikan atas konteks berbagi dalam tanggung jawab dan hak terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan rumah tangga antara perempuan dan laki-laki (Lister, 2021; Pierson, 2016; Zamberlan dkk., 2021).

Perbedaan maskulin dan feminin semakin kentara pada sektor pekerjaan yang dibayarkan dan sektor domestik yang tidak dibayar (Netting dkk., 2017). Perempuan dinilai tidak dapat memprioritaskan pekerjaan secara optimal karena terikat pada peran dalam mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak. Sehingga banyak pengusaha yang melestarikan kesenjangan gender dalam hal besar upah dan kesempatan berkarir antara perempuan dan laki-laki. Perempuan beradadalam kondisi kewanjahan karena walaupun menjadi pencari penghasilan keluargabeban kerja domestik rumah tangga masih lebih banyak dibandingkan laki-laki (Zastrow & Hessenauer, 2023). Lain halnya dengan laki-laki yang umumnya tidak mendapatkan stereotip pengasuhan dan mengurus rumah tangga.

Risiko lebih besar ketika perempuan tidak ada dalam lingkungan keluarga. Orang dewasa yang tinggal sendiri hanya dengan pasangan memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kemiskinan. Hal ini dapat terjadi ketika pasangan menilai tidak adanya tanggungan rumah tangga yang mengikat satu sama lain seperti anak. Persinggungan antara gender dengan karakteristik lain seperti usia, status rumah tangga, kedisabilitas, ras dapat membuat ketidaksetaraan yang sudah ada menjadi lebih keruh dan berisiko lebih besar menyebabkan viktimisasi terhadap

perempuan yang berakhir pada kemiskinan yang lebih ekstrem (European Institute for Gender Equality., 2020).

Ketidaksetaraan pendapatan, ketidaksetaraan kesempatan dalam pasar tenaga kerja, ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan, ketidaksertaraan kesempatan dalam akses sumber daya seperti lahan atau aset merupakan hambatan dalam pembangunan ekonomi sosial yang berdampak pada pengentasan kemiskinan (Maksimov dkk., 2017). Memberdayakan perempuan dalam jangka pendek dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pada jangka panjang kesetaraan gender merupakan faktor penting dalam mencegah mewariskan kemiskinan antar generasi, karena perempuan sering kali memikul tanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak (Gu & Nie, 2021).

Maka dari itu, penting dilakukan upaya penghapusan pada ketidaksetaraan yang ada antara perempuan dan laki-laki sehingga perempuan dapat berdaya. Pengarusutamaan gender menjadi strategi yang dapat digunakan dalam mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan.

2.2.2 Kajian tentang Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan agenda kebijakan internasional dan dapat dicapai melalui orang-orang yang melek keuangan, yang dapat membuat keputusan keuangan yang tepat dan meningkatkan kesejahteraan individu (Andreou & Anyfantaki, 2021; Balasubramnian & Sargent, 2020; Khan dkk., 2022). Inklusi keuangan digaungkan untuk memastikan tidak terjadinya eksklusi keuangan yang menyebabkan kelompok rentan jatuh ke dalam tekanan dan

keterpurukan hidup yang menjauhkan mereka dari kesejahteraan atau hidup layak (Luu dkk., 2021). Eksklusi keuangan muncul ketika individu, rumah tangga, atau kelompok tidak dapat mengakses produk dan layanan keuangan yang diperlukan dalam bentuk yang sesuai (Mohammed & Uraguchi, 2018). Eksklusi keuangan sendiri telah menjadi isu global yang berbeda di setiap wilayahnya.

Pada berbagai hasil riset yang dirangkum dalam sistematis *review* menemukan bahwa pada negara-negara berpenghasilan rendah dimana perempuan memiliki akses keuangan yang terbatas, laki-laki ditemukan lebih melek keuangan dan karenanya lebih banyak diikutsertakan secara keuangan dibandingkan perempuan (Dewi dkk., 2020; Goyal & Kumar, 2021; Khan dkk., 2022). Hal ini menunjukkan gender dan sex dapat mempengaruhi terjadi eksklusi keuangan pada kelompok masyarakat tertentu. Eksklusi keuangan yang membatasi akses keuangan dapat tereskalasi menjadi masalah sosial yang lebih masif seperti kemiskinan dan kelaparan. Akses terhadap keuangan menjadi prasyarat fundamental dari pasar keuangan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai “tanpa kemiskinan” dan “tanpa kelaparan”(Elzahi Saaid Ali dkk., 2020).

Secara umum, inklusi keuangan menyediakan akses yang memadai dari variasi keamanan, kemudahan, dan keterjangkauan terhadap berbagai layanan keuangan untuk kelompok rentan dan tidak beruntung lainnya, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pedesaan, dan tidak berdokumen, yang selama ini tidak terfasilitasi pada sektor keuangan formal (Mohammed & Uraguchi, 2018; Monye, 2022).

Mohammed dan Uraguchi mengelompokkan inklusi keuangan dalam tiga fungsi (Mohammed & Uraguchi, 2018) yang terdiri dari :

1. Ketersediaan produk dan layanan yang terjangkau dan mudah diakses.
2. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengidentifikasi dan menggunakan produk dan jasa.
3. Informasi atau perantara untuk menyelaraskan insentif dan kapasitas.

Contoh pengurangan persepsi dari risiko, memahami pelayanan, membuat keputusan yang bertanggungjawab, dan menyediakan umpan balik yang penting bagi pelaku.

Tidak hanya membicarakan tentang akses tetapi juga memastikan ketersediaan layanan keuangan yang lebih luas juga termasuk dalam literasi keuangan. Sehingga inklusi keuangan juga dapat didefinisikan sebagai memastikan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan biaya yang terjangkau dengan cara yang adil dan transparan (Monye, 2022). Adil dan transparan menjadi penting untuk mencegah terjadinya kejahatan keuangan terhadap kelompok rentan. Keterbatasan atribut sosial yang mereka miliki disandingkan pada eksklusi keuangan bisa menyebabkan mereka berada dalam manipulasi dan penipuan keuangan (Gikay, 2020).

Pendidikan literasi keuangan dibutuhkan sehingga berbagai akses dan produk layanan keuangan yang ada dapat digunakan dengan baik (Elzahi Saaid Ali dkk., 2020). Pendidikan literasi keuangan menjadi dasar fundamental dalam meningkatkan kapasitas masyarakat terutama kelompok rentan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah keuangan ataupun beragam

produk dan jasa keuangan. Maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa inklusi keuangan terdiri dari komponen pendidikan dan literasi keuangan, pendapatan dan kekayaan, serta gender (Kara dkk., 2021).

2.2.3 Kajian tentang Literasi Keuangan

Organisation for Economic Co-operation and Development atau disebut OECD menyatakan literasi keuangan secara spesifik merupakan istilah yang didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami konsep dan produk keuangan, risiko dan peluang keuangan, serta membuat pilihan berdasarkan informasi yang tepat untuk mengakumulasi penyimpanan, mendiversikan aset, dan membeli asuransi (Kara dkk., 2021). Literasi keuangan menjadi penting bagi individu ketika perkembangan skema keuangan menjadi lebih kompleks.

Jappelli dan Padulla menyatakan kurangnya literasi keuangan dasar dapat meningkatkan kerentanan terhadap guncangan ekonomi makro dan menyebabkan kebangkrutan (Luu dkk., 2021). Ketika seseorang memiliki kesadaran yang rendah terhadap keuangan sering kali memicu ketergantungan yang lebih besar. Rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi masalah serius karena mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan pribadi mereka, berinvestasi dan memanfaatkan tabungan mereka. Tidak hanya untuk jangka pendek hal ini menjadi masalah tetapi juga jangka panjang ketika seseorang telah menua dan dihadapkan pada kenyataan mereka tidak memiliki rencana pada masa pensiun.

Individu dapat melek keuangan ketika mereka memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan untuk mengurus keuangan personal dirinya. Seseorang dinyatakan melek keuangan sampai orang tersebut bisa

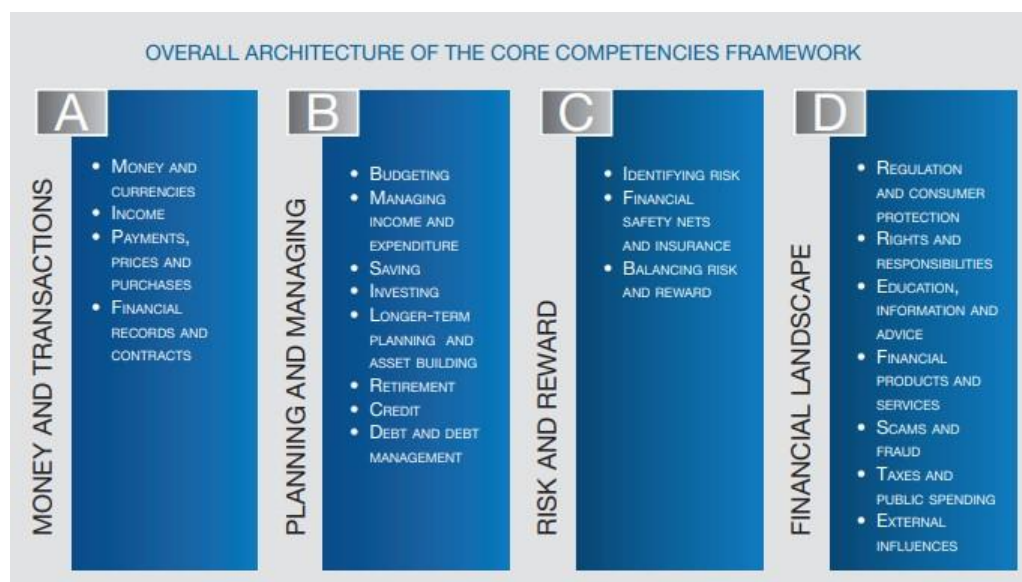
menunjukkannya dalam perilaku nyata yang benar dalam keuangan. OECD membagi 4 kelompok rentan dalam literasi keuangan yang terdiri berdasarkan gender, usia, pengguna digital dan resiliensi finansial (Kiril, 2020).

Resiliensi finansial dilihat dari kelompok yang memiliki perencanaan masa depan yang dibuktikan melalui kepemilikan tabungan untuk menghadapi krisis. OECD menyatakan terdapat tiga komponen penting dalam literasi keuangan yakni pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan (Kiril, 2020). Ketiga komponen tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengetahuan keuangan: merupakan komponen penting dalam literasi keuangan yang membantu seseorang dalam membandingkan antara produk dan layanan keuangan untuk dapat membuat keputusan keuangan yang tepat.
2. Perilaku keuangan: tindakan dan perilaku konsumen penting dalam membentuk kondisi dan kesejahteraan keuangan mereka. Beberapa perilaku, seperti gagal dalam membangun kebiasaan menabung, terlambat dalam membayar tagihan rutin bulanan, gagal dalam mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu, salah memilih produk keuangan, dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan seseorang.
3. Sikap keuangan: sikap keuangan dapat mempengaruhi keputusan keuangan seseorang. Hal ini terkait pada tindakan apa yang dilakukan jika dihadapkan pada pilihan-pilihan keuangan. Misalnya, keputusan untuk berbelanja atau menabung, beli sekarang atau besok dan sebagainya.

Berbicara tentang kerangka kompetensi inti dalam literasi keuangan untuk orang dewasa dan pemuda telah dikembangkan dalam G20 Leaders yang

merupakan alat pembangunan kebijakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2013. Kerangka ini dibangun dengan asumsi dasar bahwa kompetensi yang diidentifikasi relevan untuk remaja (usia 15-18 tahun) akan relevan dengan orang dewasa di atas usia 18 tahun dengan tambahan kompetensi yang terdiri dari kemampuan menggunakan kredit dengan tepat dan mengelola hutang, memilih dan menggunakan produk dan layanan keuangan (termasuk saluran digital, mengelola investasi dan tabungan pensiun).



Gambar 2. Inti Kerangka Kompetensi Literasi Keuangan G20/OECD

Sumber : (Kiril, 2020)

Struktur dari kerangka kompetensi inti dalam literasi keuangan G20/OECD untuk orang dewasa terdiri dari 4 area sebagai berikut :

1. Area A : Uang dan Transaksi. Area ini mencakup kompetensi inti yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti berbagai bentuk dan tujuan uang dan penggunaannya, perolehan dan manajemen pendapatan, perbandingan belanja, pembayaran, dan pentingnya catatan dan kontrak keuangan.

2. Area B : Perencanaan dan Pengelolaan. Area ini mencakup kompetensi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan anggaran dan pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, serta kompetensi perencanaan jangka panjang seperti menabung, berinvestasi, dan membuat rencana jangka panjang. Kompetensi inti khusus yang terkait dengan pensiun, penggunaan kredit dan termasuk manajemen utang.
3. Area C : Risiko dan Hadiah. Area ini mencakup kompetensi inti yang berkaitan dengan mengidentifikasi risiko, menciptakan jaring pengaman keuangan dan menyeimbangkan risiko dan imbalan. Ini mencakup risiko yang melekat dalam produk keuangan tertentu, dan jenis risiko lain yang dapat berdampak pada kesejahteraan pribadi dan keuangan rumah tangga seperti kerusakan yang disebabkan oleh banjir atau gempa bumi atau hilangnya pendapatan rumah tangga melalui kesehatan yang buruk, kecacatan atau kematian anggota keluarga.
4. Area D : Lanskap Keuangan. Area ini mencakup Ini mencakup kerangka kerja menyeluruh dari regulasi dan perlindungan konsumen, serta hak dan tanggung jawab dan penggunaan pendidikan, informasi dan saran.

2.2.4 Kajian tentang Pemberdayaan Komunitas

Pengembangan masyarakat adalah salah satu strategi paling efektif untuk menghadapi permasalahan kemiskinan terutama yang dialami pengalaman kemiskinan oleh perempuan (Grantham dkk., 2021; Marsiglia dkk., 2021). Pengembangan masyarakat adalah bekerja bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang baru dan dapat menciptakan kesinambungan antara masyarakat, ekonomi dan negara. Pada prosesnya pengembangan

masyarakat menganut nilai-nilai inti yang terdiri dari keadilan kesetaraan sosial, anti diskriminasi, pemberdayaan masyarakat, aksi kolektif, serta bekerja dan belajar bersama (Beck & Purcell, 2020; Ledwith & Springett, 2022).

Pengembangan masyarakat sebagai sebuah mekanisme perubahan pribadi dan sosial yang meliputi keadilan sosial, solidaritas, partisipasi dan keamanan. Keadilan sosial yang dimaksud adalah dengan menciptakan kesempatan yang sama dan pencapaian semua hak asasi manusia. Solidaritas yang dimaksud adalah kohesi, empati, kerja sama dan kehidupan bersama. Kemudian partisipasi yang dimaksud adalah kesempatan bagi setiap orang untuk memainkan peran yang berarti dalam pembangunan. Sementara keamanan yakni keamanan mata pencaharian dan keselamatan dari ancaman fisik.

Perubahan sosial mentransformasikan norma, nilai, kepercayaan dan akhirnya dapat termanifestasi membentuk sebuah kebiasaan baru dan budaya baru dalam masyarakat (D. Beck & Purcell, 2020). Perubahan sosial dapat terencana dan dapat tidak terencana, di saat bersamaan dapat memberikan perubahan yang positif maupun negatif. Pekerja Sosial sebagai agen perubahan pada level akar rumput dituntut menghadapi tantangan bekerja bersama dengan individu untuk menghasilkan perasaan kuat karena memiliki satu kesatuan sehingga dapat mendorong perubahan sosial yang positif dan menghadapi perubahan sosial yang negatif.

Merujuk pada sumbernya, perubahan sosial dapat muncul dari berbagai hal termasuk di dalamnya perubahan teknologi. Beck dan Purcell menyatakan terdapat 3 fokus utama dalam perubahan sosial diantaranya perubahan hukum,

perubahan ekonomi, dan perubahan individu (D. Beck & Purcell, 2020). Jika kita analogi kemiskinan sebagai perubahan sosial yang bersifat negatif, maka perubahan sosial yang diharapkan dari proses pemberdayaan harus mencapai tiga fokus utama yakni perubahan hukum, perubahan ekonomi dan perubahan individual.

Sangat penting bagi seorang pekerja sosial dalam upaya perubahan komunitas, untuk peka dan sensitif pada isu kekuatan yang terlibat dalam interaksi interpersonal sehingga dapat berkontribusi pada pemberdayaan dari pada memperkuat perasaan tidak berdaya (Thompson, 2020). Strategi dalam praktik makro dibagi menjadi 3 yang terdiri dari strategi kolaboratif, kampanye dan kontes (Netting dkk., 2017).

Perubahan komunitas terjadi melalui pengembangan komunitas (*community development*) ketika anggota dari komunitas mengenali aset yang dimilikinya dan menemukan cara bagaimana menggunakannya untuk bisa lebih produktif (Homan, 2016). Komunitas berfungsi sebagai sistem, sehingga perubahan dapat dilihat sebagai perubahan dari sistem yang ada. Perubahan tersebut menghasilkan sebuah modifikasi atau inovasi baru dalam sikap, kebijakan atau praktik yang ada dalam masyarakat dengan tujuan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah yang ada atau mengembangkan aset untuk kepentingan anggota masyarakatnya. Pada proses ini membangun keterampilan untuk dapat digunakan di masa depan dan meningkatkan kualitas hidup anggota masyarakat secara individu serta hubungan antara anggotanya (Homan, 2016).

Target melakukan perubahan dengan memenuhi kebutuhan manusia yang beragam pemberdayaan masyarakat mengembangkan berbagai model praktik komunitas. Beberapa model tersebut terdiri dari model pengembangan kapasitas atau organisasi lingkungan dan komunitas; model pengorganisasian fungsional masyarakat; model sosial, ekonomi dan pengembangan berkelanjutan; model perencanaan kebijakan; model aksi sosial dan politik, model koalisi, dan model gerakan untuk perubahan yang progresif (Netting dkk., 2017).

2.2.5 Kajian tentang Peningkatan Kapasitas

Pemberdayaan komunitas dalam mencapai perubahan dalam sebuah komunitas tidak terlepas dari 3 hal yang terdiri dari *capacity building*, *asset building* serta *connection and ownership* (Homan, 2016). Pendekatan pengembangan kapasitas atau dalam hal ini kita sebut *capacity building* menjadi alternatif dalam mencapai resiliensi seseorang termasuk terhadap guncangansosial ekonomi seperti pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Kapasitas berasal dari sebuah rasa identitas komunitas yang kuat dan kemampuannya untuk menyimpan dan memanfaatkan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekayaan, terutama pengetahuan dan keterampilan. Hal ini meliputi menguatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai mata pencaharian yang berkelanjutan, pendekatannya multidisiplin lintas sektor dalam tahap perencanaan dan implementasi, isu praktik, penekanan pada perubahan dan inovasi organisasi – teknologi, menempatkan penekanan pada kebutuhan untuk membangun modal sosial melalui eksperimen dan belajar, dan diprioritaskan untuk mengembangkan keterampilan dan kinerja individu maupun lembaga.

Sebuah komunitas termasuk individu di dalamnya yang telah mengalami peningkatan kapasitas akan mengetahui lebih banyak hal, dapat melakukan lebih banyak hal dan lebih baik serta mampu untuk mempertahankan semua kondisi tersebut untuk dapat mengakses lebih jauh dan memperluas kompetensi pertumbuhannya. Menurut Crammer, Brady dan Mcleod pada tahun 2013, *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses pemberdayaan di tingkat individu, interpersonal, dan komunitas dimana partisipannya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mempengaruhi tindakannya (Netting dkk., 2017).

Pendekatan *capacity building* dan *human capability* (Beck & Purcell, 2020) menjadi langkah awal meningkatkan pengetahuan anggota dari komunitas sehingga mereka mampu melakukan lebih banyak hal untuk mencapai tujuan perubahan. Meningkatkan keterampilan individu merupakan salah satu sub terkecil dari upaya *capacity building*. Dimana mereka dapat dilibatkan dalam dalam pengalaman, terutama ditambah dengan refleksi dan dialog, mengajarkan keterampilan, baik itu penggalangan dana, hubungan media, melakukan pertemuan, merencanakan, atau menangani konflik anggota. Kesimpulannya *capacity building* membantu pekerja komunitas untuk menyadari pentingnya memahami bagaimana unit informal terbentuk dalam masyarakat, bagaimana mereka dalam pandangan anggota masyarakat dan kekuatan apa yang dapat mereka bawa dalam intervensi komunitas.

Pada literatur pekerjaan sosial, *capacity building* merupakan salah satu taktik dari strategi dalam praktik makro pekerjaan sosial. *Capacity building*

menjadi taktik yang digunakan dalam strategi kolaboratif dengan pertimbangan sistem target setuju dengan sistem aksi bahwa perubahan perlu dilakukan. Pada *capacity building* terdapat 2 unsur utama yakni taktik partisipasi dan taktik pemberdayaan. Partisipasi di sini merujuk pada kegiatan yang melibatkan anggota dari sistem klien dalam upaya perubahan yang dilakukan. Sementara pemberdayaan merujuk pada langkah taktis yang dibutuhkan untuk menghilangkan batasan atau hambatan bagi anggota sistem klien untuk sepenuhnya berpartisipasi.

United Nation (D. Beck & Purcell, 2020) menyatakan dalam *community capacity building* adalah proses dan sarana di mana pemerintah nasional dan masyarakat lokal mengembangkan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam mereka secara berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari mereka. Potensi dan kompetensi juga menjadi konsep yang terkait dengan hal ini. Keterampilan sosial dapat diajarkan secara individu maupun kelompok untuk mendorong keberlanjutan dari program keterampilan sosial (Scales dkk., 2014). Dimana menjadi penting dalam *capacity building* dan peningkatan keterampilan individu adalah membangun keyakinan para anggota pada kemampuan mereka untuk mengajarkan keterampilan baru kepada anggota komunitas lainnya (Homan, 2016).

2.2.6 Kajian tentang Fungsi Pekerjaan Sosial dalam Model Pendidikan Berbasis Masyarakat.

Pendidikan berbasis komunitas bertujuan menumbuhkan pemahaman dan pola perilaku yang inti sarinya menciptakan masyarakat yang adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis (Sobel & Smith, 2010; Yemini dkk., 2023).

Karakteristik pendidikan berbasis masyarakat terlihat dari fokusnya pada pengetahuan lokal, isu-isu, fenomena lokal serta potensial relevan dengan semua bidang studi. Pendidikan dengan konsep ini memperluas peluang orang dewasa untuk dapat menjadi instruktur dan mentor, serta untuk membangun hubungan kolaboratif yang kuat antara anggota masyarakat (Sobel & Smith, 2010).

Pendidikan dalam praktiknya dapat menunjukkan bagaimana masyarakat dapat merekayasa beragam bentuk perubahan sosial yang demokratis. Proses pendidikan berbasis masyarakat dan pembelajaran berbasis masyarakat saling berkaitan satu sama lain dan merupakan bagian integral dari pengembangan strategi untuk mempromosikan gerakan perubahan sosial (Mayo, 2020). Tilaar mengungkapkan bahwa model pendidikan berbasis masyarakat melibatkan masyarakat dan berakar pada kebudayaan (Purnama, 2021).

Pendidikan berbasis komunitas ini sering kali dikaitkan dengan pendidikan nonformal dimana pendidikan dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat (Saepudin dkk., 2019). Pemahaman masyarakat, karakteristik, kebutuhan, kelemahan dan kekuatan perlu digali secara mendalam dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis masyarakat. Maka dalam pelaksanaannya menekankan pada kompetensi melalui pemecahan masalah di masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dilingkungannya (Saepudin dkk., 2019). Sehingga dengan kata lain menolong masyarakat untuk menolong dirinya sendiri.

Memecahkan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan dan perubahan sosial dari model pendidikan berbasis masyarakat ini

sejalan dengan praktik pekerjaan sosial dalam komunitas. Selaras dengan tiga fungsi utama dalam aktivitas pekerja sosial generalis menurut Dubois dan Miley yang terdiri dari konsultasi, manajemen sumber dan pendidikan (Miley dkk., 2017).

Fungsi konsultasi pekerja sosial dapat mendorong perubahan sosial pada diri klien di level mikro, meso dan makro dengan menjalankan peran sebagai *enabler* atau pemungkin, fasilitator, perencana, kolega dan monitor. Kemudian fungsi manajemen sumber diterapkan melalui peran broker, advokasi, penyelenggara, mediator, aktivis dan katalis. Terakhir pada fungsi pendidikan pekerja sosial dapat menerapkan peran sebagai pelatih, penjangkau, peneliti dan cendekiawan.

Pada praktiknya seorang pekerja sosial perlu menjalin ketiga fungsi di atas dalam sebuah proses layanan. Meskipun pendidikan diidentifikasi sebagai sebuah fungsi yang terpisah, proses pendidikan juga melekat pada semua kegiatan pekerjaan sosial lainnya (Miley dkk., 2017). Sehingga akan menjadi lebih komprehensif sebuah layanan pekerjaan sosial jika seorang pekerja sosial mampu membuat skema pengorganisasian yang sistematis dalam membangun dan mengintegrasikan ketiga fungsi ini.

2.2.7 Kajian tentang *Vicarious Learning*

Teori pembelajaran sosial menyatakan individu belajar dengan mengamati dan mencontoh orang lain di dalam lingkungan mereka yang mencakup perilaku *modelling*, pikiran dan perasaan (Hagan, 2011). Individu lebih cenderung meniru dan menunjukkan perilaku, pikiran dan perasaan yang diperkuat oleh lingkungan mereka. Pada praktik pekerja sosial, teori pembelajaran sosial dikaitkan dengan

mengamati *coping* strategi klien, keterampilan memecahkan masalah dan pola komunikasi efektif yang ditunjukkan orang lain (Miley dkk., 2017).

Berkaca pada teori pembelajaran sosial dipahami bahwa seseorang cenderung akan bersikap, berpikir dan berperilaku sebagaimana pengalaman belajar dengan lingkungan yang pernah dialaminya. Perbedaan cara belajar dan latar belakang pengalaman seseorang terhadap sesuatu hal menghasilkan sebuah keyakinan dalam proses belajar sambil melakukan. Keyakinan ini yang digunakan seseorang untuk memahami kejadian dimasa lalu dan menjadi penguat dalam bersikap di masa depan. Variatifnya persepsi yang terbentuk dalam kondisi ini kadang menghasilkan bias keyakinan. Secara sosial, *vicarious learning* menawarkan alternatif cara yang lebih mudah diterima untuk mengubah sebuah keyakinan yang ada saat ini dan tindakan di masa depan yang mungkin diperkuat oleh keyakinan ini (Park & Puranam, 2023). Hal ini karena pengalaman baru orang lain dapat menjadi antitesis dari keyakinan hasil proses belajar seseorang sebelumnya.

Belajar dari pengalaman orang lain dikenal dengan istilah pembelajaran keterwakilan atau *vicarious learning* (Park & Puranam, 2023). Berdasarkan beragam literatur diketahui bahwa *vicarious learning* dari orang yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan dapat berfungsi sebagai sumber dalam meningkatkan performa belajar seseorang. Hal ini membuat seseorang tidak langsung dituntut untuk mengalami keberhasilan dalam proses belajar (Bresman, 2013).

Vicarious learning dapat terjadi pada beragam tingkatan agresasi seperti di tingkat individu, kelompok dan perusahaan. Peserta didik atau seseorang yang belajar dengan *vicarious learning* memahami pengalaman orang lain melalui diskusi, konflik, tantangan, dukungan, bimbingan dari orang yang lebih kompeten dan bercerita atau *Storytelling* (Myers, 2022; Roberts, 2010). Mayoritas proses pembelajaran dengan *vicarious learning* menunjukkan peserta didik menggunakan pengalaman dari teman sebaya untuk pembelajaran dirinya (Bresman, 2013; Park & Puranam, 2023; Tufford dkk., 2021). Pembelajaran dari teman sebaya memungkinkan terjadinya umpan balik dari peserta didik terhadap pengalaman kritis anggota yang lain. Roberts berpendapat bahwa *vicarious learning* pada teman sebaya yang merupakan orang lain dengan situasi serupa satu sama lain dan memiliki status yang sama dipandang sebagai sesama pembelajar (Roberts, 2010).

Nehls menyampaikan karakteristik dari *vicarious learning* dengan aktif mendengarkan dan pemikiran reflektif, berusaha untuk memahami dengan sepenuhnya terlibat atau *engaged* dalam situasi, peserta pembelajarannya berpikir dan belajar bersama-sama (Mansoori, 2017; Roberts, 2010; Thidemann & Söderhamn, 2013). Sebelum seseorang bisa belajar dari pengalaman orang lain, dia dan teman belajarnya harus saling mengakui fakta bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang patut dipelajari (Gordon & Thomas, 2018; Roberts, 2010).

Melihat upaya perubahan komunitas melalui proses belajar yang ada di masyarakat, integrasi dari pembelajaran sosial dan *vicarious learning* dapat digunakan untuk mengubah sistem keyakinan yang ada di masyarakat.

Pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman belajar orang lain diinternalisasikan kepada pengalaman sendiri kemudian dieksternalisasikan kembali dalam bentuk sistem keyakinan yang baru. Berbagi pengetahuan dan pengalaman ini diperoleh melalui percakapan, narasi, kesaksian atau cerita. Melalui proses mengartikulasikan dan mengeksternalisasikan pengalaman dapat memperluas pemaknaan yang terkait peristiwa baru dengan merefleksikan dan mengingat kembali serta mengkonfigurasi dan menata ulang pengalaman (Roberts, 2010). Manfaat dari *vicarious learning* biasanya dikonseptualisasikan dalam bentuk mekanisme bagi peserta didik untuk memanfaatkan pengetahuan yang lebih unggul dari orang lain walaupun sumbernya tidak lebih ahli daripada pelajar atau bahkan jika sumbernya berada dalam lingkungan tugas yang tidak relevan (Park & Puranam, 2023).

2.2.8 Kajian tentang Media Pembelajaran

Belajar dilakukan oleh semua orang dan dapat berlangsung seumur hidup yang akhirnya akan memunculkan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Amka, 2018). Pekerja sosial memiliki peran dalam pendidikan yang erat dengan proses belajar. Berdasarkan pada model praktik pekerjaan sosial generalis Tracy dan Dubois (1987) menyebutkan peran pendidikan dalam pekerja sosial terdiri dari 3 peran yakni pada level mikro, meso dan makro (Miley dkk., 2017).

Pada prosesnya belajar dihadapkan kepada berbagai situasi dan sasaran yang variatif, sehingga alat bantu mengajar muncul sebagai penunjang proses belajar. Awal perkembangannya media pembelajaran berupa alat bantu visual

seperti gambar, model, objek dan alat lainnya yang memberikan pengalaman konkret kepada peserta belajar atau dengan kata lain bersifat visual. Sifatnya yang terlalu fokus pada visual terkadang menyebabkan orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran atau instruksi, produksi dan evaluasinya (Nurdyansyah, 2019). Pada tahun 1440 Johannes Gutenberg menekankan pengaruh besar benda cetak terhadap dunia pendidikan dikarenakan memiliki fungsi (Amka, 2018) :

1. Menekankan kata dari pada gambar.
2. Menjadikan pembelajaran suatu proses linear atau satu hal untuk satu waktu.
3. Menekankan konsep abstrak dari pada pengalaman konkret dalam belajar.
4. Meningkatkan peranan otak kiri di atas peranan otak kanan.
5. Mendukung individualisme dari pada kerja sama dalam belajar.

Media pembelajaran ini lahir melalui proses yang panjang yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari dunia pendidikan (Amka, 2018). Perkembangan industri, perkembangan teori komunikasi dan perkembangan pendekatan pembelajaran menjadi salah satu faktor lain yang mempengaruhi lahirnya media pembelajaran. Secara umum Seels dan Glasow membagi dua kategori dari media pembelajaran yakni media tradisional dan media teknologi mutakhir atau modern (Amka, 2018; Nurdyansyah, 2019).

Media tradisional terdiri dari media visual diam yang diproyeksikan, media visual yang tidak diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, cetak, permainan dan realia. Sementara media

teknologi mutakhir atau modern terdiri dari media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor.

Terdapat 3 landasan dalam menentukan sebuah media pembelajaran yang tepat sesuai isi dan tujuan dalam materi pembelajaran. Ketiga landasan tersebut terdiri dari landasan filosofi, landasan psikologis, dan landasan sosiologis (Amka, 2018; Nurdyansyah, 2019). Pada proses pembelajaran interaksi antara pemberi pesan dan penerima pesan sangat penting. Interaksi ini merupakan proses untuk mencari makna secara bersama yang terdiri dari kegiatan berlogika, beretika dan berestetika.

Amka memfokuskan landasan filosofi pada konsep filsafat Dewey yang sangat menghargai peranan pengalaman sebagai dasar pengetahuan dan kebijakan. Pengalaman itu mencakup segala aspek kegiatan manusia baik yang berbentuk aktif maupun pasif (Amka, 2018). Teori pendidikan yang digagas Dewey menekankan bagaimana menghubungkan pengalaman kita dengan pengalaman masa lalu dan yang akan datang. Belajar dari pengalaman dapat diartikan mempergunakan daya pikir reflektif dalam pengalaman kita. Maka dapat disimpulkan landasan filosofi media pembelajaran yakni pengguna media semestinya disadarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati banyak orang baik yang akademik maupun sosial.

Kondisi psikologis setiap orang berbeda karena perbedaan latar belakang sosial budaya, perkembangan diri dan juga faktor yang dibawa sejak lahir. Interaksi yang muncul dalam proses belajar akan berbeda tergantung pada konteks, peranan, dan status individu di antara individu lainnya (Amka, 2018).

Maka penting dalam menentukan media pembelajaran untuk memastikan kondisi psikologis baik yang akan menerima pesan maupun pemberi pesan.

Kondisi sosiologis juga menjadi penentu media pembelajaran karena mempengaruhi respon dari orang yang menerima pesan terhadap media yang digunakan. Secara sosiologis pendidikan dapat dipahami sebagai proses budaya (Amka, 2018). Budaya sendiri dinyatakan sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia melalui gagasan atau karyanya. Sehingga dalam menentukan media pembelajaran mempertimbangkan latar belakang sosial penerima pesan agar tidak terjadinya bias dari penerima pesan karena kondisi sosial yang mereka miliki.

Beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan ragam model yaitu tampilan visual, komponen, serta manfaat suatu model desain pembelajaran (Nurdyansyah, 2019). Pada penelitian ini media pembelajaran cetak dinilai sebagai media pembelajaran yang paling sesuai untuk penerima pesan dan pemberi pesan pembelajaran dari kalangan perempuan keluarga miskin yang sudah berkeluarga. Media cetak berupa poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun penggugah selera yang biasanya berisi gambar-gambar. Poster mampu mempengaruhi perilaku, sikap dan nilai masyarakat untuk berubah atau melakukan sesuatu. Hal yang membuat poster memiliki kekuatan untuk dicerna oleh orang yang melihat karena poster lebih menonjolkan kekuatan pesan, visual dan warna (Nurdyansyah, 2019). Secara umum poster memiliki kegunaan untuk memotivasi penerima pesan, memperingati penerima pesan dan pengalaman kreatif untuk penerima pesan.

Kemudian media cetak seperti buku panduan pada dasarnya seperti buku pelajaran dalam media cetak. Buku panduan memiliki nilai tertentu yang membantu pemberi pesan dalam merealisasikan kurikulum, memudahkan keberlanjutan pelajaran dan dapat dijadikan pegangan, memancing aspirasi, dapat menyajikan materi yang seragam dan sebagainya (Nurdyansyah, 2019).

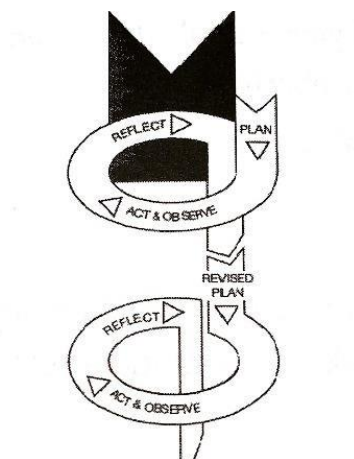
2.2.9 Kajian tentang Rekayasa Teknologi Pekerjaan Sosial

Penelitian memberikan kontribusi pada dasar teori untuk memahami perilaku dan perubahan manusia serta dapat menjadi sebuah alat untuk merancang strategi intervensi, mengukur efektivitas intervensi dan mengevaluasi praktik (Miley dkk., 2017). Rekayasa teknologi dalam pekerjaan sosial direpresentasikan melalui sebuah proses penelitian. Rekayasa teknologi pekerjaan sosial dimaknai sebagai proses membuat desain, modifikasi, pengembangan, atau menciptakan teknologi baru guna meningkatkan proses atau fungsi yang ada (Pujileksono dkk., 2021). Ruang lingkup rekayasa teknologi pekerjaan sosial meliputi Terapi Psikososial, Manajemen *Human Service Organization*, Manajemen Perubahan Komunitas, Analisa Kebijakan Sosial, dan Supervisi Pekerjaan Sosial. Proses desain rekayasa menggunakan model STEM atau *Science Technology Engineering Mathematic* dan model siklus (Pujileksono dkk., 2021).

Pada model STEM tahapan terdiri dari identifikasi masalah, diskusi pemecahan masalah, mendesain, membuat atau mewujudkan desain, dan berbagi solusi. Sementara model siklus adalah model dimana tahapan rekayasa dapat berputar kembali ke tahap awal dalam satu buah putaran. Model siklus terdiri dari tahapan identifikasi masalah, identifikasi kriteria dan kendala, diskusi kemungkinan solusi, hasilkan ide, jelajahi kemungkinan, pilih pendekatan, buat

model atau prototipe, sempurnakan desain, kemudian kembali ke tahap awal. Model STEM ini selaras dengan pendekatan penelitian dengan model *Action Research* khususnya *Participatory Action Research*.

Metode *Participatory Action Research* merupakan proses penelitian, pendidikan dan aksi dimana peneliti melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh suatu masalah untuk dapat berkontribusi dalam upaya pemecahan masalahnya melalui sumbangsih pengetahuan dan keterampilan unik mereka (Brydon-Miller, 1997a; Wilson, 2019). *Participatory Action Research* awalnya dikembangkan dari model *Action Research*, yang dihasilkan dalam sebuah siklus yang terus berkesinambungan.



Gambar 3. *Participatory Action Research Model* Kemmis dan McTaggart

Sumber : (Nelson, 2017)

Siklus ini digambarkan oleh Lewin sebagai tahapan spiral yang terdiri dari lingkaran yang mencakup perencanaan, tindakan, dan pencarian fakta tentang hasil dari tindakan atau evaluasi (Reason & Bradbury, 2008; Wilson, 2019). Kemudian Kemmis dan McTaggart mengembangkan lebih lanjut *Action Research* yang memfokuskan diri rekonstruksi praktik sosial yang disebut dengan Model *Participatory Action Research* (Yaumi & Damopolii, 2022).